

ungkap . tebus . lega

#### LATAR BELAKANG



MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL

PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK

KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER

HARGA KOMODITAS MENURUN

RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT







#### **DAMPAK**

BAGI INDONESIA



PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA



**DEFISIT NERACA PERDAGANGAN** 



**DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR** 



PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR



INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI





#### **AKIBAT KONDISI TERSEBUT**



**PENGANGGURAN** 



**KEMISKINAN** 

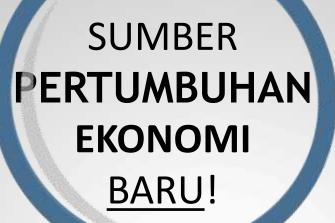


**MAKIN** 

**MENINGKAT** 







KITA HARUS

**TEMUKAN!** 









Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI









KITA HARUS

**TEMUKAN!** 





#### HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA



#### HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

pajak



#### MENGAPA SEKARANG?



#### MENGAPA SEKARANG?

#### MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:





WP <u>tidak akan</u> bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak









SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI REPATRIASI ASET

#### Yang bertujuan

- Peningkatan likuiditas domestik;
- Perbaikan nilai tukar Rupiah;
- Suku Bunga yang kompetitif;
- Peningkatan INVESTASI









PERLUASAN BASIS DATA PERPAJAKAN

- Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*









MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

#### **JANGKA PENDEK**

Penerimaan dari uang tebusan

#### JANGKA PANJANG

Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat





penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar *Uang Tebusan*.





#### **6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK**

#### **1 PENGHAPUSAN**

PAJAK YANG SEHARUSNYA TERUTANG

#### **2 TIDAK DIKENAI**

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN

#### **3 TIDAK DILAKUKAN**

PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, & PENYIDIKAN

#### **4 PENGHENTIAN**

PROSES PEMERIKSAAN,
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN,
ATAU PENYIDIKAN

#### **5 JAMINAN RAHASIA**

DATA PENGAMPUNAN PAJAK TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA APA PUN

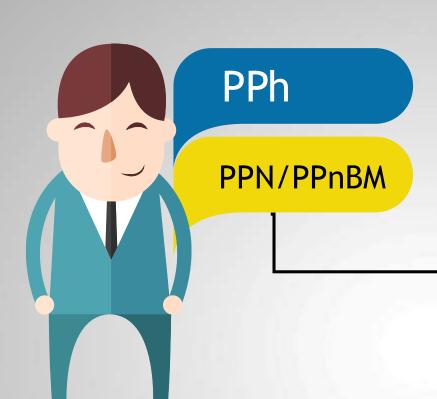
#### **6 PEMBEBASAN**

PAJAK PENGHASILAN UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN





#### BERLAKU UNTUK



Sampai dengan AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR\*

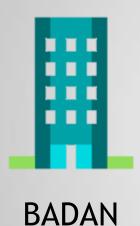
#### \* TAHUN PAJAK TERAKHIR

Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015





## "Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak"





ORANG PRIBADI (OP)



PENGUSAHA OMZET TERTENTU



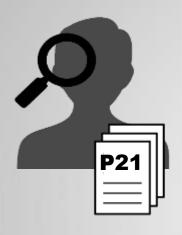
OP/BADAN BELUM BER-NPWP





#### PENGECUALIAN SUBJEK

#### Wajib Pajak yang sedang:



dilakukan **penyidikan** & berkas penyidikannya telah dinyatakan **lengkap** oleh Kejaksaan



dalam proses **peradilan** 



menjalani hukuman pidana

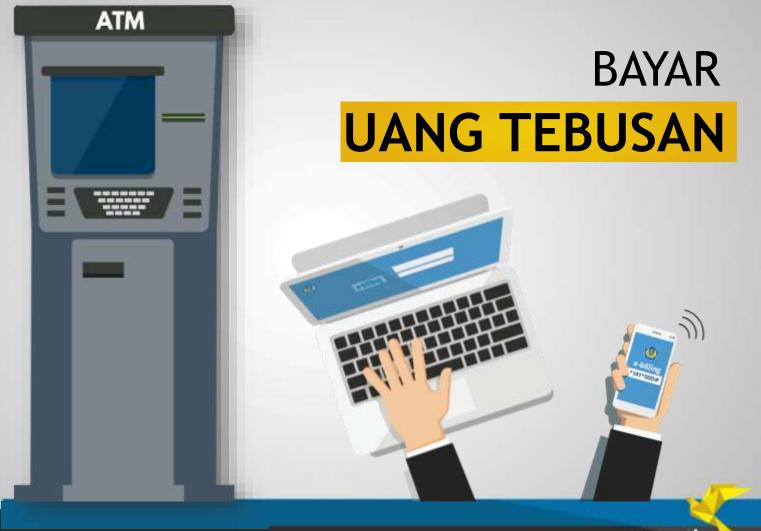
...atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan!







#### **CARA 2: TEBUS**





#### CARA HITUNG UANG TEBUSAN

### TARIF X HARTA BERSIH





#### CARA HITUNG HARTA BERSIH



#### **HARTA TAMBAHAN**

DIKURANGI

UTANG



**UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN** 

dan belum dilaporkan di SPT PPh terakhir

**HARTA BERSIH** 





#### **CARA HITUNG HARTA BERSIH**



#### HARTA BERUPA KAS DILAPORKAN SESUAI NILAI NOMINAL



HARTA SELAIN KAS DILAPORKAN SESUAI HARGA WAJAR MENURUT PERHITUNGAN WAJIB PAJAK SENDIRI



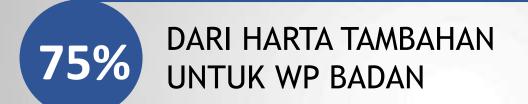
JIKA DALAM MATA UANG ASING, HARUS DIRUPIAHKAN DENGAN KURS MENTERI KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR





#### **CARA HITUNG HARTA BERSIH**

#### UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA DAPAT DIKURANGKAN PALING BANYAK:



DARI HARTA TAMBAHAN UNTUK WP ORANG PRIBADI







Adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara

BERDASARKAN PENILAIAN Wajib Pajak

Dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan **PALING LAMBAT** pada **SPT TAHUNAN PPh 2017** 





## PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI

**TARIF** 



3%



#### **PERIODE I**

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

#### **PERIODE II**

BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016

#### **PERIODE III**

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017





## PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI

**TARIF** 







#### **PERIODE I**

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

#### **PERIODE II**

BULAN KE-4 UU BERLAKU SAMPAI 31 DESEMBER 2016

#### **PERIODE III**

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017

JIKA HARTA TERSEBUT <mark>TIDAK DIALIHKAN</mark> KE DALAM NEGERI



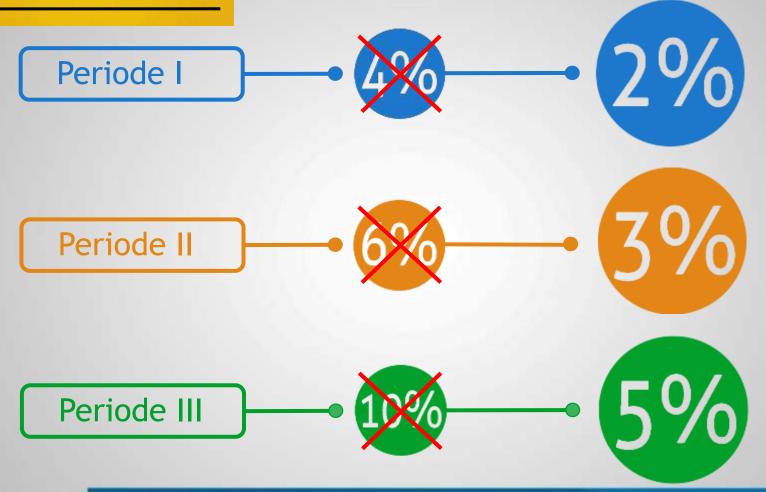


JIKA ANDA ALIHKAN & INVESTASIKAN HARTA DI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NKRI



## TARIF SPESIAL

Untuk WP yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam Wilayah NKRI





#### BATAS WAKTU PENGALIHAN HARTA MASUK KE WILAYAH NKRI

#### PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

SEJAK UU BERLAKU S.D. AKHIR BULAN KE-3

PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

BULAN KE-4 UU BERLAKU S.D. 31 DESEMBER 2016

#### PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN

1 JANUARI 2017 SAMPAI 31 MARET 2017







#### SARANA INVESTASI

- Surat berharga Negara Republik Indonesia
- Obligasi BUMN;
- Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah;
- Investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK;

- Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
- Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.

Jangka Investasi
PALING SINGKAT

3 TAHUN

di Indonesia





# TARIF KHUSUS PELAKU USAHA OMZET SAMPAI RP4,8M





#### TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU

## WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. Rp4,8MILIAR PADA TAHUN PAJAK TERAKHIR

0,5%

JIKA HARTA YANG
DIUNGKAPKAN **SAMPAI DENGAN**Rp10 MILIAR

2%

JIKA HARTA YANG
DIUNGKAPKAN LEBIH
DARI
Rp10 MILIAR

SEJAK UU BERLAKU S.D. 31 MARET 2017









JANGKA WAKTU MINIMAL HARTA TAMBAHAN YANG DIUNGKAPKAN ATAU DIALIHKAN MASUK KE WILAYAH NKRI UNTUK <u>TETAP BERADA</u> DI WILAYAH NKRI





#### **CARA PERMOHONAN**





- Seputar Pengampunan Pajak
- Persyaratan yang diperlukan
- TUNGGAKAN PAJAK
- Penghitungan uang tebusan



**Bayar** Uang Tebusan

SURAT PERNYATAAN
HARTA
UNTUK
PENGAMPUNAN PAJAK

Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya





1 JUMLAH POKOK pajak yang belum dilunasi

TAMBAHAN PAJAK yang masih harus dibayar termasuk PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN (berdasarkan keputusan DJP atau putusan peradilan)





## **SURAT PERNYATAAN HARTA** UNTUK **PENGAMPUNAN PAJAK**

Surat Pernyataan berisi identitas WP, harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan

> Oleh WP sendiri untuk Orang Pribadi

Oleh pemimpin tertinggi Badan Usaha atau kuasanya untuk Badan Usaha





## SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK

Surat Pernyataan dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali





#### **PERSYARATAN**



#### MEMILIKI NPWP



#### MEMBAYAR UANG TEBUSAN

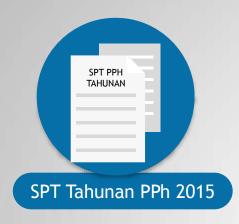


TELAH MELAPORKAN
SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR





#### SPT TAHUNAN PPh TERAKHIR



Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015



Bagi WP yang tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 s.d. 30 Juni 2015





#### **PERSYARATAN**

SKP STP

<u>SKP</u>

MELUNASI SELURUH POKOK TUNGGAKAN (TERMASUK CABANG)

BAGI WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN/ATAU PENYIDIKAN, HARUS MELUNASI:

- PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
- PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK DIKEMBALIKAN

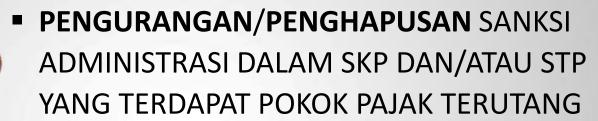




#### **PERSYARATAN**

#### MENCABUT PERMOHONAN





- PENGURANGAN/PEMBATALAN

  KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
- GUGATAN, KEBERATAN, BANDING, & PK
- PEMBETULAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN





# 1 O HARI KERJA

#### Menteri Keuangan MENERBITKAN Surat Keterangan Pengampunan Pajak





TIDAK DAPAT diminta oleh siapa pun

TIDAK DAPAT diberikan pada pihak mana pun



TIDAK DAPAT dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun

Barangsiapa MEMBOCORKAN informasi akan dihukum PIDANA PENJARA paling lama 5 TAHUN





SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR

### SEGERA!



#### SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

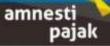


WP TIDAK MEMANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK



DAN DJP MENEMUKAN HARTA YANG BELUM DILAPORKAN

**KONSEKUENSINYA?** 



#### **KONSEKUENSI**

SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

MAKSIMAL

SPT

**TAHUN** 

Sejak Berlakunya UU Pengampunan Pajak

Harta tersebut akandiperhitungkan

sebagai tambahan

penghasilan

Dan DIKENAI PAJAK
dengan ditambah SANKSI
ADMINISTRASI sesuai
UU PERPAJAKAN









#### JIKA SETELAH MASA PENGAMPUNAN BERAKHIR

DJP MENEMUKAN
HARTA YANG BELUM
DILAPORKAN WP YANG
IKUT PROGRAM
PENGAMPUNAN PAJAK

Dan **DIKENAI PPh** dengan ditambah **SANKSI** 

200%

Harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan







Segala SENGKETA yang berkaitan dengan pelaksanaan AMNESTI PAJAK hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan pada

**BADAN PERADILAN PAJAK** 





#### **TERIMA KASIH**











ungkap . tebus . lega